

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Silalahi, D. Napitupulu, and G. Patria, “Kajian Konsep dan Kondisi *E-Government* di Indonesia,” *Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 1, no. 1, pp. 10–16, 2015, [Online]. Available: <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=356188>
- [2] Y. Yusriadi and U. Farida, “Bureaucracy Performance in Public Services in Indonesia,” *J. Ad’ministrare*, vol. 6, no. 1, p. 17, 2019, doi: 10.26858/ja.v6i1.9434.
- [3] F. Masyhur, “Penelitian *e-Government* di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI),” *J. IPTEKKOM J. Ilmu Pengetah. Teknol. Inf.*, vol. 19, no. 1, p. 51, 2017, doi: 10.33164/iptekkom.19.1.2017.51-62.
- [4] T. K. Priyambodo Y. Prayudi, “A Proposed Strategy for Secure and Trusted Environment in eGovernment,” *Lect. Notes Electr. Eng.*, vol. 362, no. June 2016, pp. 891–902, 2016, doi: 10.1007/978-3-319-24584-3.
- [5] Å. Grönlund and T. A. Horan, “Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues,” *Commun. Assoc. Inf. Syst.*, vol. 15, no. March 2014, 2005, doi: 10.17705/1cais.01539.
- [6] Pemerintah Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia,” 2001.
- [7] Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

- 3 Tahun 2003,” *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT*, vol. 113, no. 2. Indonesia, pp. 180–190, 2003.
- [8] E. E. Supriyanto, “Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia,” *J. Ilmu Pemerintah. Kaji. Ilmu Pemerintah. dan Polit. Drh.*, vol. 1, no. 1, p. 141, 2016, doi: 10.24905/jip.v1i1.438.
- [9] Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,” vol. 2025, pp. 1–38, 2010.
- [10] Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” 2018.
- [11] R. Indonesia, “... Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” *Bab I*, 2018.
- [12] Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” 2020.
- [13] Kementerian PAN RB, “Peraturan Menteri PAN & RB No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE,” 2020.
- [14] Kementerian Hukum dan HAM, “PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK KANTOR WILAYAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,” 2022.

- [15] I Made Sukarsa *et al.*, “Evaluation of *E-Government* Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework,” *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 4, no. 2, pp. 243–253, 2020, doi: 10.29207/resti.v4i2.1825.
- [16] M. R. Y. Saputra, W. W. Winarno, and Henderi, “Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3,” *Indones. J. Bus. Intell.*, vol. 3, no. 1, pp. 14–19, 2020, doi: 10.21927/ijubi.v3i1.1188.
- [17] M. A. R. FIRDAUS, “EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG MENGGUNAKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SPBE,” p. 69, 2019.
- [18] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang, “Evaluasi Penerapan *E-Government* Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ),” vol. 4, no. 11, pp. 4116–4124, 2020.
- [19] S. R. Utami, “EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA BDA SUKAMANDI,” vol. 8, no. 5, p. 55, 2019.

- [20] A. A. Bouty, M. H. Koniyo, and D. Novian, “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan *E-Government* Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo),” *J. Penelit. Komun. Dan Opini Publik*, vol. 23, no. 1, 2019, doi: 10.33299/jpkop.23.1.1758.
- [21] W. Z. FAKI, “EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO MENGGUNAKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SPBE,” 2019.
- [22] Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik in,” vol. 22, no. 7, pp. 874–882, 2018.
- [23] Kementerian Hukum dan HAM, “Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT),” vol. 5253004, no. 021, pp. 565–572, 2022.
- [24] ISACA, *COBIT 2019 Framework Introduction and Methodology*. Schaumburg: ISACA, 2019.
- [25] ISACA, *COBIT 2019 Governance and Management Objectives*. Schaumburg: ISACA, 2019.
- [26] C. Emeka Elue, CISA, “Effective Capability and Maturity Assessment Using

COBIT 2019,” 2020.

- [27] ISACA, “What is CMMI?”
- [28] P. Mowat, U. Kingdom, M. R. Germany, C. Shang, and E. Van Veenendaal,  
“Changes in CMMI 2.0 and how they can affect TMMi,” pp. 1–21, 2020.
- [29] ISACA, “How is CMMI V2.0 different from V1.3?,” 2020.
- [30] ISACA, “CMMI Levels of Capability and Performance.”
- [31] P. M. Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Aswaja  
Pressindo, 2015.
- [32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [33] E. D. Kartiningrum, “Panduan Penyusunan Studi Literatur,” *Lemb. Penelit.  
dan Pengabd. Masy. Politek. Kesehat. Majapahit, Mojokerto*, pp. 1–9, 2015.